

                      

SOREANG (Mal) Pengelolaan keuangan di tubuh Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kab. Bandung masih amburadul. Penggunaan keuangan KONI Kab. Bandung tidak disertai alat pendukung sehingga tidak bisa dibuktikan kebenarannya.

Selain itu, belum dibayarnya pajak selama dua tahun berturut-turut yaitu tahun 2010-2011, yang mencapai ratusan juta rupiah, mengindikasikan adanya penyalahgunaan keuangan oleh sejumlah oknum tertentu.

Hal itu diperparah dengan tidak diberikannya dana triwulan kepada sebagian pengurus. Ini membuktikan adanya penyimpangan. Dana triwulan itu sifatnya normatif karena dikeluarkan dari dana murni APBD, sehingga tidak ada alasan bagi pengurus (bendahara) untuk tidak memberikannya, ujar sumber yang enggan disebut namanya.

Menurut data yang diperoleh, dana APBD KONI Kab. Bandung tahun 2012 mencapai Rp 7.750.000 milyar. Anggaran itu diperoleh dari dana murni Rp 6 milyar dan ditambah dana perubahan Rp 1.750.000 milyar.

Anggaran perubahan itu untuk dana insus atlet dan pelatih Pelatda PON XVIII sebanyak 101 orang yang belum terbayarkan dari bulan Juli sampai Desember (enam bulan) sebesar Rp 242.400.000. Masing-masing mereka mendapat Rp 400.000.

Selain itu, untuk dana peralatan 27 cabang olahraga (cabor) sebesar Rp 750.000.000, suplemen 81 atlet Pelatda PON selama delapan bulan (Januari-Agustus) 2012 Rp 129.600.000, dan bonus bagi 30 atlet peraih medali emas PON XVIII Rp 600.000.000. Tapi yang diajukan KONI Rp 750 juta.

Sementara itu, KONI Kab. Bandung menerima bantuan dari Pemkab Bandung sebesar Rp 360 juta untuk membeli sebuah kendaraan mini bus jenis Elf. Dana itu diperoleh melalui anggaran murni Rp 160 juta ditambah anggaran perubahan Rp 200 juta. Tapi, sampai sekarang belum terlihat adanya kendaraan baru yang diparkir di halaman KONI Kab. Bandung Jalan Raya Soreang. (Wanisar/Mal)